

## Menko Polhukam Ajak Uni Eropa untuk Ciptakan Perdamaian

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengajak Uni Eropa untuk bekerja sama menciptakan perdamaian untuk situasi dunia yang aman bagi seluruh masyarakat.

"Kedamaian abadi bisa terjadi jika kita menggunakan integritas kita dalam menyampaikan pendapat, dan kita harus menahan diri untuk tidak menerapkan standar ganda," kata Hadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5).

Dikutip dari Antara, saat menghadiri pertemuan Hari Eropa bersama Delegasi Uni Eropa dari Indonesia, Brunei Darussalam, dan ASEAN di Jakarta (15/5), Hadi menjelaskan perdamaian dunia harus tercipta agar kemakmuran dan stabilitas keamanan di setiap negara dapat tercipta.

Hal tersebut dapat terwujud jika Indonesia dan Uni Eropa mau melakukan

langkah politik luar negeri serta meminta semua pihak menurunkan ego sektoral demi mereda konflik yang sedang terjadi.

Hadi pun meyakini Indonesia dan Uni Eropa dapat memainkan peran itu lantaran memiliki beberapa persamaan nilai yakni demokrasi, supremasi hukum, dan multilateralisme.

Nilai-nilai ini, lanjut Hadi, diperkuat melalui Partnership Cooperation Agreement (PCA), sehingga dapat mendorong kerjasama yang lebih kuat lagi.

Dengan upaya tersebut, Hadi berharap Indonesia dan Uni Eropa dapat berperan banyak dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sebelumnya, selain Hadi, beberapa tokoh juga terlihat hadir dalam pertemuan itu, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, dan perwakilan Regional the European Investment Bank. ●han

## Airlangga: Munas Golkar Tetap Desember 2024

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menekankan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar, yang salah satu agendanya untuk memilih ketua umum, tetap dilaksanakan Desember 2024 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

"Desember," ujar Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (16/5).

Saat ditanya apakah ketentuan itu menutup peluang diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Airlangga menegaskan penyelenggaraan Munas sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai

Golkar. "AD/ART sudah menyatakan Desember (setiap lima tahun)," ujar Airlangga.

Wacana mempercepat penyelenggaraan Munas Golkar menjadi Munaslub, sempat mengemuka beberapa waktu lalu.

Munaslub partai beringin bisa terjadi apabila terdapat hal-hal yang luar biasa seperti ketua umum yang bermasalah dengan hukum, serta harus mendapat dukungan, dengan jumlah suara tertentu, dari perwakilan DPD partai seluruh Indonesia.

Namun para elite partai beringin di pusat maupun daerah menyangsikan hal itu bisa terjadi. Selain karena tidak ada urgensi, penyelenggaraan Munas Golkar juga hanya tersisa hitungan bulan. ●osm



FOTO: ANT

## RDP KOMISI IX DPR DENGAN KEMENKES DAN BKKBN BAHAS STUNTING

Menkes Budi G. Sadikin memberikan paparan saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5). RDP yang diikuti Kepala BKKBN tersebut membahas perkembangan pelaksanaan upaya penurunan stunting sebagai program nasional tahun 2024 dan membahas perkembangan percepatan pelaksanaan program intervensi spesifik bagi anak stunting tahun 2024.

## Dewas KPK Tolak 1 Ahli dari Ghufron di Sidang Etik

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menghadirkan dua orang saksi ahli dalam sidang etik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mutasi ASN Kementerian Pertanian (Kementan). Satu saksi ahli dari Ghufron ditolak bersaksi oleh majelis persidangan etik Dewas KPK.

"Ya tadi didengar keterangan tiga orang saksi dan dua orang ahli. Tapi satu orang ahli ditolak oleh majelis," kata anggota Dewas KPK, Syamsuddin Harris kepada wartawan, Kamis (16/5).

Syamsuddin mengatakan alasan penolakan tersebut adalah saksi ahli yang dibawa Ghufron dinilai tidak sesuai dengan materi sidang. Dia menjelaskan, saksi ahli yang ditolak itu merupakan ahli bidang kepegawaian.

"Pak NG (Nurul Ghufron) menghadirkan ahli

bidang kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Padahal yang diperlukan ahli terkait materi sidang yakni ahli etik," ujar Syamsuddin.

Sementara itu, sidang etik dugaan penyalahgunaan wewenang Nurul Ghufron dalam membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian masih akan bergulir. Ghufron dijadwalkan menyampaikan pembelaan sebagai terdakwa dalam sidang, Jumat (17/5).

"Besok (Jumat hari ini) akan ada sidang lanjutan, yaitu pembelaan dari saya," kata Ghufron di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/5).

Sidang etik Nurul Ghufron ini digelar pertama kali pada Selasa (14/5). Sejauh ini sudah ada 10 saksi diperiksa KPK dalam proses sidang. Para saksi itu terdiri atas sembilan saksi dan satu saksi ahli. ●han

# 2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



## JUSUF KALLA BERSAKSI DALAM SIDANG KORUPSI LNG

Wapres Ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla bersaksi menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi LNG atau gas alam cair dengan terdakwa Karen Galaila Agustiawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16/5). Sidang mantan Dirut Pertamina itu beragenda mendengarkan saksi yang meringankan terdakwa.

# Djarot Sebut Bakal Ada Kejutan di Rakernas PDIP

Djarot Syaiful Hidayat mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tidak diundang. Dia menyebut keduanya sangat sibuk. "Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa, karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," ucap Djarot.

JAKARTA (IM) - Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat meminta berbagai pihak agar tetap menunggu kejutan yang akan muncul dalam gelaran Rapat Kerja

Nasional (Rakernas) PDIP ke-5 akhir Mei mendatang. Kejutannya, kata dia, termasuk soal tamu undangan yang akan hadir nanti. "Kejutan-kejutan apa saja

yang nanti akan muncul di Rakernas tunggu saja, termasuk juga siapa saja yang akan diundang," kata Djarot saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/24).

Djarot menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tidak diundang. Dia mengatakan keduanya sangat sibuk.

"Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa, karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," ucapnya.

Djarot menyampaikan Rakernas nanti akan dihadiri kader internal PDIP. "Jadi ini hanya internal PDIP, pesertanya hanya internal PDIP," jelasnya.

Lebih jauh Djarot menyampaikan sikap PDIP dan posisi PDIP merespons isu eksternal partai, baik sikap terhadap jalannya pemerintahan maupun sikap terhadap dinamika geopolitik.

"Sikap dan posisi PDIP itu sebenarnya ada dua macam, secara eksternal. Satu, bagaimana sikap dan posisi PDIP terhadap jalannya pemerintahan ke depan dan bagaimana sikap PDIP

menyikapi berbagai macam dinamika geopolitik secara global untuk mendorong bisa terwujudnya perdamaian dunia yang abadi," ujarnya.

Hanya Djarot tidak mengungkapkan sikap PDIP itu pada saat ini. "Bagaimana ketegasan dari sikap politik PDIP sebaiknya ditunggu saja," imbuhnya.

Seperti diketahui, PDIP akan menggelar Rakernas yang berlangsung pada tanggal 24-26 Mei 2024. PDIP menjadikan Rakernas sebagai momentum penting untuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional. ●mar

## JK Nilai DPA Tak Perlu Dihidupkan Lagi

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK menilai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak perlu dihidupkan lagi lantaran sudah terdapat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai pengganti DPA.

"Tidak perlu lagi rasanya, Wantimpres saja cukup. Masa ada dua," ucap JK saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (16/5). Adapun DPA merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam UU.

UU Nomor 19 Tahun 2006 mengatur keberadaan suatu dewan pertimbangan itu yang disebut dengan Wantimpres. Walaupun demikian, kedudukan Wantimpres tidak dimaknai sebagai sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain, seperti DPA pada masa sebelum perubahan UUD 1945.

Sebelumnya, usulan Presidential Club diformalitaskan menjadi DPA disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang

Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

"Saya hanya menyampaikan kalau mau diformalkan kita pernah punya DPA, tetapi pascareformasi itu kan dihapus, diganti dengan namanya Wantimpres. Ya kalau mau diformalkan lagi biar lebih bagaimana gitu, ya, boleh saja, tergantung Prabowo, tetapi itu harus melalui tentu saja amandemen kelima (UUD 1945)," kata Bamsot.

Ia mengatakan bahwa apabila Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghendaki DPA dihidupkan kembali, maka akan diisi oleh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Ya, mantan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, diwadahkan dalam bentuk formal supaya juga ada pride (kebanggaan) bagi mantan-mantan Presiden-Wakil Presiden RI sebagai Dewan Pertimbangan Agung," katanya. ●mar

## Menkes: Tidak Ada Rencana Ubah Iuran BPJS Tahun 2024

JAKARTA (IM) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan tidak ada rencana mengubah iuran BPJS Kesehatan. Dia mengatakan besaran iuran yang ada saat ini tetap berlaku.

"Kita akan pakai dasar yang iurannya ada sekarang sampai itu ada proses perubahan dari iuran itu sendiri, dan sampai 2024 kita tidak ada rencana untuk mengubah iuran premi BPJS, jadi bayar BPJS kita tidak ada rencana ubah tahun 2024," kata Budi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/5).

Budi mengatakan iuran BPJS yang akan diubah ke KRIS masih dalam tahap pertimbangan. Dia mengatakan persoalan iuran itu masih dibicarakan BPJS dengan pihak rumah sakit.

"Sekarang kita lagi pertimbangan batas iurannya pakai kelas yang mana. Sebenarnya sebentar lagi sudah final, kok, dan itu yang dibicarakan juga dengan BPJS, dibicarakan juga dengan asosiasi rumah sakit," ucapnya.

Budi menyebutkan mungkin ada perdebatan antara pemberi layanan rumah sakit dengan masyarakat. Namun

pemerintah berfokus pada peningkatan layanan rumah sakit.

"Ini pasti ada perdebatan antara pemberi layanan, rumah sakit, dengan masyarakat. Nah, kita pemerintah side-nya ke 280 juta rakyat, bahwa kualitasnya harus lebih baik," katanya.

Budi juga sebelumnya buka suara mengenai perubahan kelas I, II, dan III BPJS Kesehatan ke ruang perawatan rumah sakit KRIS. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Perpres Jaminan Kesehatan.

Budi menyatakan KRIS tidak menghapus kelas BPJS Kesehatan, tapi pelayanan di rumah sakit ditingkatkan dengan kualitas yang seragam untuk semua layanan.

"Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat. Jadi itu ada kelas III kan, sekarang semua naik ke kelas II dan kelas I," ujar Menkes saat mendampingi Jokowi di RSUD Kabupaten Konawe, Selasa (12/5).

"Jadi sekarang lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih bagus. Nanti permenkes-nya sebentar lagi keluar sesudah Pak Presiden tanda tangan," sambungnya.

Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan peraturan turunan untuk menjadi landasan hukum pemberlakuan KRIS. Ke depannya, semua rumah sakit diharapkan bisa mengimplementasikan layanan tersebut sebelum 30 Juni 2025. ●osm



FOTO: ANT

## TNI AL GAGALKAN PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER

Danlanal Palembang Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan (tengah) bersama Danposal Jambi Kapten Laut (P) Agus (kanan) dan Kadispem Lantamal III Jakarta Letkol Laut (KH) M. Qomar (kiri) menunjukkan benih lobster yang akan diselundupkan ke luar negeri saat konferensi pers di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta Utara, Kamis (16/5). TNI AL dari Tim Gabungan Fleet One Quick Response (FOR) Lanal Palembang mengagalkan penyelundupan 52 box Benih Bening Lobster (BBL) senilai Rp46,8 miliar di perairan Lambu Luar Provinsi Jambi yang rencana akan dikirim ke negara Singapura dan menangkap empat orang tersangka.

### PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HQS TRADE INDONESIA No. 45, tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dihadapan NITA ALAWIAH, SH, MKN, Notaris di Kota Cilegon, bahwa PT HQS TRADE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah dibubarkan terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024.

Kepada pihak ketiga diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada kami dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengumuman ini di muat dalam Surat Kabar.

td  
Direksi  
PT HQS TRADE INDONESIA

### PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

Dalam rangka memenuhi Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dengan ini PT Anugrah Tambang Smelter ("Perseroan") bermaksud mengumumkan hasil pengambilalihan atas sebagian besar saham Perseroan oleh PT Anugrah Neo Energy Materials berdasarkan Akta No. 05, Tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Nikmah Nasution, SH. Pengambilalihan ini yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian teratas langsung atas Perseroan.

Jakarta, 17 Mei 2024  
Hormat kami,  
PT Anugrah Tambang Smelter  
Direksi

### PENGUMUMAN LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan akta No.7 Tgl. 6 Mei 2024, dibuat di hadapan Miki Tanumiharja, SH, Notaris di Jakarta, PT BANDAR CCTV INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") telah dibubarkan. Seluruh urusan hal tersebut kami, Likuidator Perseroan, mengundang para Debitor, Kreditor dan pihak pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan tagihan-tagihan, hutang-hutang dan hubungan hukum lainnya serta menyampaikan secara tertulis kepada Likuidator pada alamat dibawah ini paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman ini.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

LIKUIDATOR  
PT BANDAR CCTV INDONESIA  
("DALAM LIKUIDASI")  
Jalan Mangga Dua Raya Blok C No.62, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara